

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
2018

PERMENHUB NO. 59 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 837, 52 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, perlu diatur mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2016; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENKEU No. 29/PMK.06/2010; PERMENKEU No. 244/PMK.06/2012; PERMENKEU No. 78/PMK.06/2014; PERMENKEU No. 150/PMK.06/2014; PERMENKEU No. 246/PMK.06/2014; PERMENKEU No. 4/PMK.06/2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENKEU No. 251/PMK.06/2015; PERMENKEU No. 271/PMK.06/2015; PERMENKEU No. 69/PMK.06/2016; PERMENKEU No. 83/PMK.06/2016; PERMENKEU No. 111/PMK.06/2016; PERMENKEU No. 136/PMK.05/2016; PERMENKEU No. 181/PMK.06/2016; PERMENKEU No. 229/KMK.06/2016; PERMENKEU No. 247/PMK.06/2016; PERMENEU No. 65/PMK.06/2017; PERMENKEU No. 99/PMK.05/2017.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi pengelolaan barang milik negara, pejabat pengguna barang milik negara, perencanaan kebutuhan dan penggarapan barang milik negara, pengadaan barang milik negara, penggunaan barang milik negara, pemanfaatan barang milik negara, pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara, penilaian barang milik negara, pemindahtanganan barang milik negara, pemusnahaan barang milik negara, penghapusan barang milik negara, penatausahaan barang milik negara, pendelegasian kewenangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara, ganti rugi dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2018 dan ditetapkan tanggal 28 Juni 2018.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 64 hlm.